



PANDUAN PENYUSUNAN KAMUS BIDANG ILMU

0 202
N

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
1993**



PANDUAN PENYUSUNAN KAMUS BIDANG ILMU

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
1993



PANDUAN PENYUSUNAN KAMUS BIDANG ILMU

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi	No. Induk : 0003
R	Tgl. : 7-1-2011
499-210 202	Ttd. : _____
PAN	
P	

PRAKATA

Di dalam menangani masalah kebahasaan dan kesastraan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menerbitkan beberapa buku pedoman, antara lain *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang telah diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan No. 0196/U/1975 tanggal 27 Agustus 1975. Pedoman itu kemudian mengalami perbaikan seperlunya (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0389/U/1988, tanggal 11 Agustus 1988). Dalam pada itu, dirasakan bahwa di samping buku pedoman itu diperlukan pula buku petunjuk penyusunan kamus istilah.

Panduan ini disusun berdasarkan tulisan Prof. Dr. Anton M. Moeliono yang berjudul "Dua Pedoman Pelengkap Pembentukan Istilah". Setelah melalui pembahasan dalam empat kali Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, akhirnya naskah itu kemudian disahkan menjadi "Panduan Penyusunan Kamus Istilah", seperti yang dijadikan judul buku pada cetakan pertama (1984). Pada cetakan kedua ini (1993) judul tersebut diubah/disesuaikan menjadi *Panduan Penyusunan Kamus Bidang Ilmu*.

Mudah-mudahan panduan ini dapat menjadi petunjuk bagi para anggota panitia istilah, para ahli berbagai bidang ilmu dan teknologi, para ahli bahasa, serta para peminat lain dalam penyusunan kamus istilah dalam bidang ilmu matematika, biologi, fisika, atau kimia. Dengan demikian, akan terbantu usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pembakuan dan pematapan istilah dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa keilmuan.

Jakarta, Januari 1993
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa

Hasan Alwi

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
I. Pembatasan Masalah	2
II. Pemanfaatan Sumber Informasi	3
III. Konsep dan Definisi	4
IV. Penyiapan Naskah	6
V. Penyusunan Indeks menurut Abjad	13
VI. Penerbitan	14
LAMPIKAN:	
<i>Ilmu Farmasi</i>	15
<i>Ilmu Kemineralan</i>	17

PANDUAN PENYUSUNAN KAMUS BIDANG ILMU

Pendahuluan

Di dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, yang diterbitkan pada tahun 1975 oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diberikan sekumpulan patokan dan saran yang dapat dipakai sebagai penuntun dalam usaha pembentukan istilah. Berkat pedoman itu berbagai istilah keilmuan dapat diciptakan dengan lebih berasio. Namun, istilah yang menjadi sendi penting di dalam pertukaran informasi harus diperkenalkan secara luas, disepakati bersama untuk diterima, dan dipakai secara merata jika manfaatnya hendak dibuktikan. Salah satu jalan untuk mencapai maksud itu ialah penerbitan dan pemasukan kumpulan istilah ke dalam pasaran sehingga mudah dicapai oleh semua kalangan masyarakat yang berkepentingan.

Oleh karena itu, sebagai pelengkap pedoman umum itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menerbitkan *Panduan Penyusunan Kamus Bidang Ilmu* ini yang berdasar pada rekomendasi *International Organization for Standardization (ISO)*, yakni pedoman ISO—R 704—1969 dan ISO—R 919—1969, tentang asas-asas penamaan dan penyiapan tata istilah berdasarkan klasifikasi. Tujuan panduan ini ialah menjadi petunjuk bagaimana cara menyusun definisi istilah yang baik sebagai dasar pemilihan nama istilah dan bagaimana menyiapkan kumpulan istilah yang komprehensif yang layak diterbitkan dalam bentuk kamus. Dengan adanya panduan ini sebagai tambahan kepada *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* para pembentuk istilah mudah-mudahan dapat memperlancar usahanya yang terpuji dalam penyiapan daftar istilah dan kamus istilah. Daftar dan kamus itu selanjutnya akan mempercepat proses pembakuan peristilahan Indonesia.

I. Pembatasan Masalah

1. Bidang ilmu yang akan dicakup oleh tata istilah dibatasi lebih dahulu dengan cermat dan terperinci menurut bagian-bagiannya. Tidaklah cukup jika hanya disebut nama bidang induknya saja. Misalnya, bidang induk *geografi* hendaknya diperinci dulu. Perincian bidang itu akan menentukan jumlah dan corak istilah yang dimasukkan ke dalam suatu daftar dan juga istilah yang dikeluarkan walaupun berhubungan dengan bidang itu.
2. Pembatasan dan klasifikasi bidang ilmu dapat dipermudah dengan pemakaian suatu sistem klasifikasi yang berlaku dalam bidang itu; misalnya, keluaran *International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)*, *International Union of Biochemistry*, UNESCO, atau terbitan seperti *Universal Decimal Classification (UDC)* dan *Nomina Anatomica*. Bagi ilmu-ilmu yang sistem klasifikasinya belum dikodifikasi, hendaklah diusahakan supaya tercapai sistem klasifikasi yang dapat dipersetujui oleh kalangan ahli yang berkepentingan.
3. Panjang pendeknya daftar istilah dan besar kecilnya kamus bidang ilmu bergantung pada masuk tidaknya konsep yang sangat spesifik ke dalam kumpulan yang direncanakan. Taraf spesialisasinya itu ditentukan pula oleh kalangan yang menjadi sasaran, yaitu pemakai istilah itu.
4. Tiap daftar istilah hendaknya memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep yang terdapat di dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Walaupun begitu, daftar istilah hendaknya tidak mencakup lebih dari seribu konsep dasar itu. Jika konsep itu dianggap terlalu banyak, bidang ilmu itu diperinci lagi menjadi dua subbidang atau lebih dan tata istilahnya pun perlu disusun secara terpisah (Lihat contoh klasifikasi subbidang dalam lampiran panduan ini). Yang dimaksudkan dengan konsep dasar ialah konsep yang didukung oleh kata dasar. Tiap-tiap konsep dasar dapat mempunyai sejumlah konsep turunan. Misalnya, sulfur mendukung konsep dasar, sedangkan sulfat, sulfide, sulfurik mendukung konsep turunan.
5. Penyiapan daftar istilah yang benar-benar lengkap, yang

mencakup semua aspek bidang ilmu yang bersangkutan, biasanya memakan waktu yang terlalu lama sehingga daftar itu tidak pernah selesai atau penerbitannya tertunda-tunda sehingga daftar itu sudah tidak mutakhir lagi. Lagi pula, keperluan orang akan istilah keilmuan yang umum dan keperluan para ahli akan istilah khusus yang dipakai di dalam spesialisasinya tidak akan dapat dilayani secara seimbang jika pekerjaan itu tidak dilakukan secara bertahap.

6. Daftar istilah yang disusun menurut abjad dan kamus bidang ilmu yang dilengkapi dengan definisinya selalu dijabarkan dari daftar istilah yang berdasarkan klasifikasi konsep yang terdapat di dalam ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, tercapai daftar yang komprehensif (lihat Pasal (4) di atas), yang dengan seimbang menyajikan konsep-konsep menurut taraf kepentingannya. Pembentukan istilah menurut urutan huruf A, B, C, dan seterusnya di dalam suatu daftar tanpa klasifikasi sebelumnya tidak akan mencapai maksud itu.

II. Pemanfaatan Sumber Informasi

1. Ada tiga macam sumber yang dapat dipakai untuk menyusun tata istilah, yaitu:
 - a. bahan terbitan peristilahan, seperti kamus istilah dan karangan tentang tata istilah;
 - b. bahan terbitan yang tidak khusus mengenai peristilahan; misalnya, buku pegangan, buku pelajaran, ensiklopedi teknis, katalogus niaga; dan
 - c. tabel klasifikasi, yakni sinopsis berdasarkan klasifikasi yang mengikhtisarkan konsep-konsep bidang ilmu yang bersangkutan.
2. Sumber yang paling penting ialah berbagai daftar standar dan rekomendasi internasional yang terdapat di dalam tiap jenis sumber yang dikemukakan di atas. Bibliografi UNESCO tentang daftar istilah dan kamus bidang ilmu murni dan terapan hendaknya dikonsultasi juga.
3. Langkah pertama dalam penyusunan daftar istilah ialah penetapan sistem klasifikasi semua konsep bidang atau subbidang ilmu yang akan dimasukkan. Jumlah konsep

(misalnya, 300, 500, atau 1000) sudah harus ditentukan sebelumnya. Untuk keperluan itu rekomendasi ISO—R 704—1968(E), tentang asas penamaan, hendaknya dipakai.

III. Konsep dan Definisi

1. Hakikat Konsep

Konsep atau satuan pikiran tidak sama dengan barang rujukannya karena konsep itu abstrak. Konsep itu dilambangkan oleh istilah secara lisan atau tulisan.

2. Pembatasan Konsep

Penentuan batas-batas konsep menghendaki penetapan batas abstraksinya dan penetapan hubungannya dengan konsep lain di dalam bidang ilmu yang sama. Oleh karena itu, perlu ditentukan genusnya dan spesinya. Misalnya, pohon ialah genus pohon pisang, pohon pisang ialah spesi pohon. Selain hubungan genus dan spesi, terdapat hubungan antarkonsep di dalam klasifikasi yang, misalnya, terdapat dalam sistem kekeluargaan, seperti sekandung, sepupu, semenda, ipar, biras.

3. Tabel Sinopsis Konsep

Penetapan batas di antara konsep yang satu dan konsep yang lain hendaknya disertai dengan tabel sinopsis, yakni daftar konsep berdasarkan klasifikasi atau dengan gambar grafik yang melukiskan genealoginya. Penyusunan istilah berdasarkan suatu daftar menurut abjad (dari A hingga Z) hanya menguntungkan dari segi produksi istilah, tetapi tidak menguntungkan dari segi kelengkapan yang bersistem yang diperlukan untuk terbitan yang baik.

4. Urutan Keutamaan Ciri yang Serupa

Ciri khas konsep bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Ciri intrinsik atau hakiki, antara lain, berhubungan dengan bentuk, rupa, sifat, besar kecilnya, atau zatnya. Ciri ekstrinsik dapat dibagi lagi atas ciri yang bertalian dengan (1) tujuannya (penerapannya, fungsinya, cakupannya, lokasinya, dan posisinya di dalam satu perangkat) serta (2) asal-usulnya (metode pembentukannya, penemunya, pere-

kanya, pemerinya, penghasilnya, negeri asalnya, atau pembekalnya). Biasanya, ciri-ciri itu ditentukan oleh posisi konsep yang bersangkutan di dalam sistem konsep yang merangkumnya. Namun, kadang-kadang harus dipilih di antara ciri-ciri yang ekuivalen. Dalam hal itu, dianjurkan agar di dalam penentuan ciri diperhatikan urutan seperti di atas, yaitu ciri intrinsik, tujuan, dan setelah itu, asal-usulnya.

5. Klasifikasi konsep

- a. Konsep yang akan dipilih untuk daftar istilah dan kamus istilah digolongkan menurut klasifikasi sehingga hubungan di antara konsep yang bertalian menjadi jelas. Di dalam pemilihannya sedapat-dapatnya dibedakan empat macam konsep, yaitu (1) konsep pokok, yang khusus bertalian dengan (sub)bidang ilmu tertentu; misalnya, dalam teknik kendaraan bermotor, konsep mobil, limusin; (2) konsep luasan, yang masuk bidang yang lebih luas daripada bidang yang bersangkutan; misalnya, dalam teknik kendaraan bermotor, konsep roda; (3) konsep pinjaman, yang sering dipakai di dalam bidang yang bersangkutan, tetapi yang sebenarnya merupakan konsep pokok di bidang lain; misalnya, dalam teknik kendaraan bermotor, konsep minyak pelumas, bahan bakar; dan (4) konsep umum, yang bertalian dengan kosa kata umum.
- b. Di dalam kumpulan istilah yang bersangkutan diusahakan agar jumlah konsep jenis (2) dan (3) dibatasi benar-benar, sedangkan konsep jenis (4) sedapat-dapatnya dihindari kecuali jika dipakai dalam arti khusus (Bandingkan 'Prosedur Pembentukan Istilah', *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, II, 2.8). Saran itu diajukan agar dihindari dua hal, yaitu: (1) tumpang tindih yang terlalu banyak di antara berbagai kumpulan istilah, dan (2) keinginan pembentuk istilah menyusun sendiri istilah konsep pinjaman (Lihat Pasal (4) di atas) yang hasilnya mungkin berbeda dengan bentuk istilah konsep yang sama yang di bidang lain dianggap konsep pokok. Walaupun begitu, adanya tumpang tindih antara berbagai daftar istilah memang tidak dapat dielakkan karena

- (1) ilmu-ilmu memiliki perkaitan, (2) sebagian istilah ilmu diambil dari kosa kata umum, dan (3), berbangkit dari (1) dan (2), kadang-kadang terdapat kesukaran menentukan keanggotaan bidang pokok bagi suatu istilah; misalnya, keanggotaan istilah (menurut bidang) seperti operasi (*operation*), umpan balik (*feedback*), dan variasi (*variation*) tidak mudah ditentukan.
- c. Jika daftar konsep telah disusun, tiap konsep diberi nomor urut. Penambahan konsep yang baru disisipkan di antara konsep yang sudah terdaftar. Konsep sisipan itu diberi nomor dengan tambahan tanda huruf (misalnya, 307a) agar penomoran yang sudah ditetapkan jangan berubah.
- d. Jika di dalam kumpulan istilah harus dimasukkan konsep luasan atau konsep pinjaman, atau konsep yang terdapat di dalam kosa kata umum, perlu diselidiki dahulu ada tidaknya istilah dan definisi yang sudah ditetapkan oleh ahli yang berwewenang di bidang itu. Jika ada, istilah dan definisi itulah yang sedapat-dapatnya dipertahankan sehingga terjamin suatu keselarasan dan konkordansi, asal saja, tentu, istilah itu sesuai dengan asas pembentukan istilah dan asas penamaan.

IV. Penyiapan Naskah

1. Perumusan Definisi sebagai Titik Tolak

- a. Tiap konsep ditulis pada satu carik naskah (*manuscript slip*). Penggarapan istilah hendaknya dimulai dengan menetapkan rumusan definisi konsep yang bersangkutan pada carik naskah. Demi kelancaran pekerjaan, rumusan itu bertolak dari satu rujukan atau referensi, baik yang diciptakan sendiri maupun yang tersedia di dalam salah satu sumber. Saran ini bertujuan agar cakupan itu diungkapkan secara eksplisit sehingga penyusun istilah terhindar dari bahaya salah pilih kata. Misalnya, karena terjemahan harfiah, istilah *auto-suggestion* pernah diindonesiakan menjadi saran diri, padahal *suggestion* di sini bukan 'saran' atau 'usul', melainkan 'pengaruh lewat proses mental'. Ciri-ciri definisi diberikan dalam rekomendasi ISO—

180—R 704 tentang asas penamaan.

- b. Di dalam proses mencari dan memilih istilah yang tepat definisinya, perlu dicapai kejelasan tentang konsep yang bersangkutan. Untuk mencapai kejelasan itu perlu ditetapkan perangkat ciri intrinsik suatu konsep yang menentukan daya terapinya dan cakupan segala sesuatu yang masuk medan terapannya. Perangkat ciri-ciri hakiki konsep disebut *intensi* konsep itu, sedangkan rujukan yang dapat diterapi istilah itu dinamai *ekstensi* konsep itu (medan terapannya).

2. Konkordansi Definisi

Yang dimaksudkan dengan definisi konsep ialah penentuan tempatnya di dalam sistem semua konsep yang bertalian. Rumusan definisi hendaknya dibandingkan dengan definisi konsep-konsep yang lain yang termasuk dalam sistem yang sama.

3. Pemakaian Istilah dalam Definisi

Semua istilah khusus yang dipakai di dalam suatu definisi perlu dijadikan butir masukan tersendiri dan diberi definisi juga dalam terbitan yang sama. Namun, hendaknya dijaga agar makna istilah yang satu tidak didefinisikan oleh makna istilah yang lain yang maknanya ditafsirkan lagi dengan istilah yang satu itu. Misalnya, cerita rekaan 'karya sastra berdasarkan fiksi' dan fiksi 'karya sastra berdasarkan rekaan'. Oleh karena itu, definisi dengan jalan rujuk silang yang melingkar perlu dihindari.

4. Pembatasan Cakupan Definisi

Kadang-kadang definisi hanya dapat diterapkan pada sejumlah kasus (ekstensi) yang terbatas. Dalam hal itu, daya terapinya hendaknya ditegaskan; misalnya, dengan catatan bahwa definisi itu hanya berlaku di bidang tertentu atau untuk terbitan tertentu.

5. Kecermatan Definisi

Taraf kecermatan definisi bergantung pada corak dan

maksud kamus istilah serta kalangan pemakai yang menjadi sasarannya. Misalnya, definisi suatu konsep matematika dalam buku pelajaran akan lebih cermat daripada definisinya di dalam kamus umum. Jika tidak dapat diberikan definisi yang cermat atau lengkap, konsep setidaknya-tidaknya dilengkapi dengan penjelasan atau pemerian.

6. Genus yang Terdekat

Genus konsep yang dipakai di dalam definisi yang berdasarkan ciri-ciri intrinsik (intensi) ialah genus terdekat yang bertalian yang juga diberi definisi di dalam kamus, atau genus yang dianggap sudah dikenal secara umum.

7. Definisi Berdasarkan Ciri Hakiki yang Tidak Lengkap

Ciri pembeda di dalam definisi konsep yang berdasarkan ciri-ciri intrinsiknya hendaknya lengkap. Misalnya, definisi *obeng* = *alat tukang kayu* tidak membedakan obeng dari palu, gergaji, atau kikir. Definisi yang tidak lengkap seperti itu mudah dikenali karena kedua suku di dalam persamaan itu tidak dapat dipertukarkan.

8. Manfaat Definisi Berdasarkan Medan Terapannya

Definisi yang berdasarkan ekstensi konsep tidak dapat tuntas karena mungkin ada spesi yang baru ditemukan atau direkakan setelah definisi itu ditetapkan. Namun, definisi berdasarkan ekstensinya sering memberikan gambaran yang lebih jelas daripada definisi berdasarkan intensinya. Oleh karena itu, definisi berdasarkan ekstensinya berguna sekali untuk tujuan praktis (baik sebagai definisi maupun sebagai pelengkap definisi berdasarkan intensinya). Misalnya, makna istilah Inggris *screwdriver* dengan cepat diterangkan dengan memberikan definisi: 'alat tukang kayu untuk memutar sekrup' atau dengan memberi *obeng*, sebagai padanannya.

9. Jenis Ilustrasi dan Gunanya

Ilustrasi sering banyak manfaatnya untuk menjelas-

kan definisi atau menambah kecermatan pemahamannya. Ilustrasi dapat berupa gambar atau diagram.

10. Pemilihan Istilah

Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan, istilah yang akan dimasukkan ke dalam daftar atau kamus dibentuk dan dipilih menurut prosedur pembentukan istilah di dalam buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (II, 2.8). Jika terdapat beberapa istilah sinonim yang sudah atau yang dapat dipakai, masing-masing hendaknya dibedakan menjadi (1) istilah yang diutamakan, (2) istilah yang diizinkan, dan (3) istilah yang dijauhkan, sesuai dengan Pasal IV, 4.2. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* tentang sinonim dan kesinoniman. Dalam penyusunan daftar atau kamus, istilah yang dijauhkan itu tidak perlu lagi dikemukakan.

11. Kesesuaian Istilah dengan Definisi

Makna harfiah istilah turunan dalam bentuk, misalnya, turunan, majemuk, dan frase, serta makna istilah berdasarkan majas (*figure of speech*), seperti metafor dan metonim harus mencerminkan ciri khas konsep yang akan diterangkan.

12. Makna Harfiah Istilah Turunan dan Gabungan Kata

Istilah yang terdiri dari kata turunan atau gabungan kata dapat dianggap sama dengan definisi yang dipendekkan. Oleh karena itu, istilah seperti itu harus mencerminkan makna yang terungkap oleh gabungan konsep yang mendasarinya. Di samping itu, hendaknya diperhatikan bahwa, karena sifat kependekannya itu, istilah itu tidak perlu memuat tiap komponen yang tersimpul di dalam gabungan konsep dan definisinya. Yang diperlukan hanyalah ciri-ciri yang membedakannya dari konsep lain yang bertalian. Misalnya, suku cadang lebih baik daripada suku cadangan atau suku yang dicadangkan, jembatan timbang lebih baik daripada jembatan untuk menimbang.

13. Kemungkinan Pembentukan Istilah Turunan

Di dalam pemilihan istilah baru harus diusahakan agar bentuknya dengan mudah memungkinkan derivasi menurut kaidah tata bahasa yang lazim. Misalnya, bentuk *melit* (*curious*) lebih mudah dibuat derivasinya daripada *ingin tahu*; bandingkan *kemelitan*, *pemelit*, (*yang*) *termelit* dengan *keingintahuan*, *orang yang ingin tahu*, (*yang*) *paling ingin tahu*.

4. Istilah Gabungan Kata yang Menyesatkan

Unsur yang diterangkan dalam istilah yang berupa gabungan kata (D-M) yang tidak merujuk ke genus konsep yang dilambangkan sebaiknya dihindari. Misalnya, kata (D) *akhir* (M) sebagai padanan *voting* (M)—*account* (D) atau *stem* (M) *motivering* (D) tidak sebaik *sandaran* (D) *suara* (M).

15. Istilah Berdasarkan Peralihan Makna

Istilah baru dapat diperoleh dengan memberikan arti khusus kepada kata dalam kosa kata umum atau kepada istilah yang dipakai di dalam bidang ilmu lain asal saja bidang itu berjauhan sehingga tidak mungkin timbul ketaksaan atau kedwivartian. Misalnya, *masukan* dan *keluaran* untuk *input* dan *output*. Istilah jenis itu, yang dipilih dengan baik, akan lebih singkat daripada istilah turunan atau istilah gabungan kata yang khusus dibentuk untuk maksud itu. Misalnya, *gulma* (*weed*) lebih baik daripada *tumbuhan pengganggu*.

16. Istilah yang Taksa (Berdwivarti)

Adanya istilah yang dapat bermakna banyak tidak mungkin dihindari. Namun, istilah yang sifatnya polisem atau homonim hanya membingungkan jika sekaligus terjadi dua hal, yaitu: (1) istilah yang sama mendukung berbagai makna yang bermiripan, dan (2) istilah itu sering muncul di dalam konteks yang sama karena dipakai dalam bidang ilmu yang sama. Dalam hal itu, perlu dicari istilah yang berbeda sebagai pengganti istilah yang membingungkan itu. Contoh istilah yang

tidak perlu menimbulkan ketaksaan ialah bola pancang (*bowling*) dan tiang pancang (*concrete pile*) karena bidangnya berjauhan. Gejala ketaksaan timbul jika, misalnya, istilah alkohol digunakan untuk (1) kelas senyawaan alkohol, (2) etil alkohol atau etanol, dan (3) minuman keras.

17. Istilah Sinonim

Sinonim menjadi beban ingatan dan dapat menimbulkan kesan yang keliru, yaitu bahwa istilah sinonim masing-masing melambangkan konsep yang sama atau yang berbeda-beda. Misalnya, rambang, rawak, rawu, acak, serampang, dan sembarang yang dipakai sebagai padanan *random*, *haphazard*, *casual*, dan *desultory*. Karena di dalam bahasa teknis, langgam yang baik berpokok pada kejelasan dan tidak terutama pada variasi, pembakuan golongan sinonim perlu mendapat perhatian khusus.

18. Istilah Internasional dan Asli yang Bersifat Sinonim

Istilah yang dalam bentuk tulisannya bercorak internasional banyak yang berasal dari bahasa Latin atau Yunani. Berlainan dengan anjuran yang tercantum pada Pasal (17) di atas, baik istilah internasional maupun padanannya yang berpangkal pada bahasa Indonesia atau bahasa serumpun sebaiknya dibiarkan berdampingan sebagai sinonim. Di dalam teks yang resmi, seperti di dalam perundang-undangan, istilah asiliah — jika ada — yang dipakai, sedangkan istilah internasional perlu dikenal dan dapat dipakai untuk komunikasi internasional. Bandingkan, misalnya, frekuensi dan kekerapan, temperatur, dan suhu, diameter dan garis tengah. Dalam daftar atau kamus istilah, kesinoniman dilambangkan dengan tanda titik koma dengan mendahulukan istilah yang diutamakan.

19. Ketaatan pada Pemakaian Istilah yang Sudah Mantap

Jika istilah atau konsep sudah diterima secara umum dan merata, istilah itu hendaknya tidak diubah tanpa alasan yang mendesak dan meyakinkan. Alasan yang

sah, misalnya, ialah pelanggaran asas peristilahan atau penamaan. Jika perubahan itu tidak diterima orang banyak, akan timbul sinonim baru atau istilah baru yang taksa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pedoman ini pertama-tama dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi pembentukan istilah baru dan bagi pemilihan istilah yang diutamakan di antara istilah yang sudah ada.

20. Perubahan Makna

Perubahan makna kata tidak mudah diterima dengan merata, kecuali jika perubahan itu menyangkut unsur kosa kata yang jarang atau tidak dikenal secara umum (Lihat 'Prosedur Pembentukan Istilah', Bab II, 2.8 *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*). Misalnya, usaha pembatasan makna **menonton** dan **penonton** agar dipakai lagi dalam kombinasi dengan **televisi** tidak berhasil. Jika, karena perkembangan gagasan, makna istilah keilmuan berubah, maka cakupan makna baru konsep yang bertautan dengan istilah itu perlu didefinisi lagi dengan cermat. Jika istilah itu tetap membingungkan setelah perubahan definisinya itu, sebaiknya dicari istilah yang baru.

21. Konteks yang Menggantikan Unsur Istilah

Konteks istilah generik (genus) dapat menyempitkan maknanya sehingga menjadi sama dengan makna istilah spesifiknya (spesinya). Akibat itulah yang memberikan peluang kepada pemakai bahasa untuk meningkatkan istilah dalam konteks tertentu. Misalnya, salah satu jenis kendaraan (genus) di luar konteks hendaklah disebut **kendaraan bermotor** (spesi). Di dalam ikatan kalimat seperti *kendaraannya kehabisan bensin* istilah kendaraan sebenarnya merujuk kepada makna 'kendaraan bermotor'.

22. Transliterasi

Jika di dalam peristilahan atau penyusunan istilah perlu digunakan transliterasi huruf Siril (Rusia), Arab,

Ibrani, atau Yunani ke huruf Latin, hendaknya diperhatikan rekomendasi ISO yang berikut:

ISO—R 9 *International System for the Transliteration of Cyrillic Characters;*

ISO—R 233 *International System for the Transliteration of Arabic Characters;*

ISO—R 259 *Transliteration of Hebrew;* dan

ISO—R 315 *Transliteration of Greek into Latin Characters.*

23. Panitia Penyelaras

Naskah yang selesai disusun hendaknya dikirimkan kepada sejumlah ahli yang dimintai ulasannya atau dibawa ke suatu sidang untuk dibahas bersama. Dalam hal ini, perlu ada panitia penyelaras untuk menyelaraskan tata istilah berbagai bidang sehingga duplikasi kerja dapat dihindari.

24. Naskah Penerbitan

Setelah naskah daftar istilah atau naskah kamus dipinda dan disempurnakan, baru dibuat naskah cetaknya untuk penerbitannya.

V. Penyusunan Indeks menurut Abjad

1. Sejalan dengan penyiapan kumpulan carik naskah, pekartuan indeks sementara mengenai istilah masukan berdasarkan abjad dapat mulai disusun.
2. Jika konsep dan istilah yang diolah sudah mencapai jumlah sekitar 250, penyusunan daftar istilah sementara menurut abjad dapat dimulai berdasarkan pekartuan indeks yang sudah terkumpul. Pekartuan indeks dan daftar sementara itu selanjutnya dikembangkan sesuai dengan laju pekerjaan.
3. Jika jumlah konsep daftar istilah sudah menjadi definitif, dibuatlah daftar akhir menurut abjad. Disarankan agar di dalam pengabdian istilah Indonesia kebiasaan yang sudah teradat di bidang perkamusan Indonesia diikuti.

4. Yang menjadi pangkal urutan istilah ialah kata dasarnya atau bentuk yang dianggap begitu. Pertimbangannya ialah adanya istilah turunan yang dapat berawalan ber-, di-, meng-, ke-, peng-, per-, se-, ter-. Jika huruf pertama awalan itu menjadi pegangan pengabjadan, terjadi tiga hal yang patut dihindari, yaitu (1) daftar di bawah huruf *B, D, K, M, P, S,* dan *T,* mungkin menjadi terlalu panjang jika dibandingkan dengan daftar di bawah huruf lain; (2) istilah yang makna pokoknya sebenarnya didukung oleh kata atau bentuk dasarnya, dan bukan oleh afiksnya, akan dicari di bawah huruf pertama awalan yang bersangkutan yang tidak mudah dipertautkan dengan konsep yang meng-alasinya atau dengan terjemahan bahasa asingnya; dan (3) perangkat istilah yang berpangkal kata atau berbentuk dasar yang sama mungkin tersebar di bawah huruf yang berbeda-beda. Misalnya, perangkat istilah menyerap, terse-rapkan, (zat) penyerap, penyerapan, keterserapan, serapan, daya serap jenis, kedayaserapan, semuanya didaftarkan di bawah huruf *s* sebagai berikut:

Serap

1. daya serap	<i>absorptivity</i>
2. kedayaserapan	<i>absorptivity</i>
3. keterserapan	<i>absorbability</i>
4. menyerap	<i>absorb</i>
5. penyerap (zat—)	<i>absorbent</i>
6. penyerapan	<i>absorption</i>
7. serapan	<i>absorption</i>
8. terserapkan	<i>absorbable</i>

5. Keuntungan lain yang diperoleh dengan cara itu ialah bahwa daftar istilah Inggris-Indonesia, yang istilah asingnya lebih banyak dicirikan oleh akhirannya, tidak akan jauh berbeda dalam urutannya dengan daftar istilah Indonesia-Inggris.

VI. Penerbitan

Cara memperbanyak dan mendistribusikan kumpulan istilah sehingga mencapai kalangan yang menjadi kelompok sasaran yang paling tepat perlu dipikirkan masak-masak karena istilah yang sudah dibakukan dewasa ini dinantikan oleh banyak orang. Sebaik-

nya penerbitan istilah itu dilaksanakan sesudah istilah dibakukan pada tingkat Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia untuk memberi kesempatan kepada para ahli untuk mencoba istilah yang disahkan itu dari segi penggunaannya. Arus balik informasi dari penggunaannya itu dapat mendorong pembentukan istilah baru yang lebih baik daripada yang disahkan pada Majelis Bahasa sebelumnya dan menyisihkan pembentukan istilah yang kurang baik.

LAMPIRAN

Di bawah ini disertakan contoh klasifikasi yang diusulkan untuk bidang farmasi dan bidang ilmu kemineralan sebagai kerangka acuan pembentukan istilahnya.

I. Ilmu Farmasi

A. Farmaseutika

1. Perhitungan farmasi
2. Farmasi kuantum
3. Termodinamika farmasi
4. Larutan dan kelarutan
5. Kinetika farmasi
6. Sistem dispersi
7. Reologi
8. Biofarmasi

B. Farmasi Biologi

1. Farmakognosi
2. Fitokimia
3. Serologi dan imunologi
4. Alergologi

C. Kimia Farmasi

1. Tata nama bahan obat
2. Kimia farmasi anorganik
3. Kimia farmasi organik
4. Kimia bahan alam
5. Desain bahan obat

D. Farmakologi

1. Lintas-tubuh obat
2. Farmakodinamika
3. Farmakokinetika
4. Posologi

II. Teknologi Farmasi**A. Farmasi Penyediaan dan Pemabrikaan**

1. Formulasi
2. Penyaringan dan pemisahan bahan farmasi
3. Ilmu dan teknik meracik
 - a. Sediaan padat dan semi padat
 - b. Sediaan cair
 - c. Sediaan mata dan parenteral
 - d. Erosal
4. Pengetahuan wadah dan bahan kemasan
5. Radiofarmasi

B. Analisis Farmasi

1. Persyaratan dan pengujian
2. Analisis obat, makanan, dan kosmetik
3. Pengujian hayati
4. Kromatografi
5. Analisis instrumen
6. Toksikologi/Farmasi kehakiman

C. Farmasi Klinik

1. Analisis klinik
2. Antaraksi obat
3. Alat kesehatan

D. Administrasi Farmasi

1. Undang-undang farmasi
2. Manajemen farmasi
3. Farmasi masyarakat
4. Farmasi pemerintahan
5. Farmasi rumah sakit
6. Farmasi industri

Ilmu Kemineralan

I. Ilmu Murni

A. Kristalografi

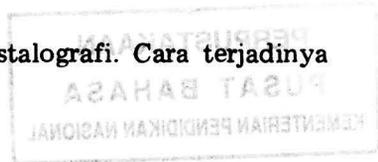
1. Sistem hablur. Hukum. Teori tangkup
2. Pertumbuhan tindh hablur. Agregat. Perkembaran
3. Kimia hablur. Sifat kimia-morfologi. Keisomorfian dan kepolimorfian
4. Ketidak-teraturan. Kepungan. Cacat. Tutupan. Hablur negatif
5. Pembentukan. Pertumbuhan. Penghabluran kembali. Perwatakan. Bentuk ekahablur.
6. Pseudomorf dan kepseudomorfian
7. Struktur molekul. Teori diskontinum

B. Mineralogi

1. Penentuan mineral dan berbagai sifatnya.
2. Unsur dalam keadaan bebas. Karbide. Boride. Fosfide. Nitride.
3. Sulfide. Garam sulfo. Mineral *Se* dan *To* yang berse-suaian
4. Garam halogen. Halogenide dan Oksi-halogenide
5. Okside. Hidrokside. Oksisulfide
6. Silikat. Titnat. Zirkonat Torat
7. Garam asam-oksi lain
8. Mineral organik
9. Mineral menurut kriteria kristalografi. Cara terjadinya optika. Dasar fisika lain.

C. Geologi Ekonomi

1. Penggolongan endapan mineral menurut asalnya
2. Penentuan dan pemerian bijih dan mineral ekonomi
3. Asal dan cara pembentukan mineral
4. Mineral logam
5. Mineral bukan logam
6. Endapan mineral berkarbon
7. Permata dan setengah permata
8. Mata air mineral

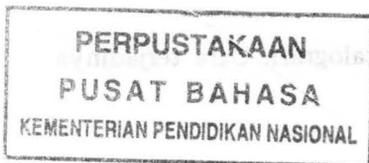


II. Ilmu Terapan/Teknologi Mineral**A. Pertambangan Umum**

1. Penyelidikan pendahuluan dan eksplorasi
2. Operasi tambang dan penggalian
3. Peralatan dan kemudahan tambang
4. Pengangkutan dan penimbunan
5. Pengolahan bahan galian
6. Masalah tata lingkungan dan pemanfaatan kembali tanah pertambangan
7. Keamanan dan kesehatan tambang dan pemeliharaannya. Polisi pertambangan.

B. Minyak Bumi. Gas Bumi. Panas Bumi

1. Penyelidikan pendahuluan dan eksplorasi
2. Operasi
3. Peralatan dan kemudahan
4. Pengangkutan dan penimbunan
5. Pengilangan
6. Masalah tata lingkungan
7. Keamanan dan kesehatan dan pemeliharaannya. Polisi pertambangan.



499.

I